



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

e-klipping

Kumpulan Berita Harian Media Online

SUBJEK

EKONOMI

Selasa, 30 Mei 2023

BIRO HUMAS, KEARSIPAN DAN TATA USAHA PIMPINAN
Perpustakaan
2023

Daftar Isi

1. DEDOLARISASI, ANTARA SPEKULASI DAN REALITIS – *Media Online Kompas*
2. NORMA KETENAGAKERJAAN DEMI INVESTASI BERKELANJUTAN – *Media Online Kompas*
3. EU DEFORESTATION – FREE LABEL MAY RUN COUNTER TO SDGS – *Media Online The Jakarta Post*

Dedolarisasi, antara Spekulasi dan Realitas

Muhamad Chatib Basri

Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia

Ilmu ekonomi mungkin berlebihan. Ia punya mimpi—dan mungkin juga kesombongan—untuk mencoba menjelaskan berbagai hal, termasuk soal perkawinan, gosip, dan sebagainya.

Gary Becker, pemenang Nobel Ekonomi dari University of Chicago, misalnya, pernah menulis "The Theory of Marriage"; Esther Dufo dan Abhijit Banerjee—keduanya pemenang Nobel Ekonomi dari MIT—menulis risalah "Using Gossips to Spread Information" (Banerjee, Chandrasekhar, Dufo, and Jackson, 2019).

Saya tak ingin menambah daftar itu—dan bisa salah—tetapi konsep pacaran mungkin sebuah contoh sederhana dari apa yang disebut ekonom sebagai *double coincidence of wants* (keinginan timbal balik dari kedua belah pihak).

"Pacaran"—secara umum—akan terjadi jika kedua pihak "mau sama mau" atau memiliki ketertarikan timbal balik. Ia mengingatkan saya pada ekonomi barter: pertukaran atau transaksi di antara dua pihak terjadi karena apa yang ditawarkan pihak pertama cocok dengan apa yang diminta pihak kedua, dan sebaliknya. Dalam praktik, menemukan kecocokan ini tak mudah. Bayangkan, seseorang yang ingin menukar beras untuk dapat daging belum tentu bisa mendapatkan pihak lain yang juga ingin menukar daging untuk mendapatkan beras.

Bisa dibayangkan rumitnya hidup di zaman barter. Transaksi hanya terjadi jika ada *double coincidence of wants*. Membuat transaksi perdagangan hampir sama sulitnya seperti mencari pacar. Mungkin saja berlebihan, tapi ekonomi barter punya biaya transaksi dan proses koordinasi yang rumit. Orang lalu mencari jalan: menciptakan perantara alat tukar (*medium of exchange*) yang bisa digunakan semua atau banyak pihak.

Dari sana, konon, sejarah uang bermula. Kalimat "digunakan semua atau banyak pihak" menjadi penting. Semakin kecil jumlah "yang menggunakan" uang tersebut sebagai alat tukar" semakin tinggi tingkat kesulitan atau *transaction cost* dan *coordination cost*.

Pemicu dedolarisasi

Ilustrasi di atas menjadi penting ketika isu dedolarisasi muncul akhir-akhir ini. Ketegangan geopolitik antara Rusia dan negara Barat telah memicu sanksi kepada Rusia. Rusia tak bisa melakukan transaksi internasionalnya dalam dollar AS. Ia lalu mencari alat tukar lain, seperti renminbi (RMB).

Bola terus bergulir. Selain Rusia, beberapa negara juga mulai membuat *memorandum of understanding* (MoU) kerja sama bilateral menggunakan RMB. Argentina dan Pakistan, misalnya, sepakat

untuk menggunakan RMB dalam perdagangannya dengan China.

Presiden Xi Jinping juga mengunjungi Arab Saudi dan membahas kemungkinan penggunaan RMB untuk ekspor minyak Saudi ke China. Brasil dan China juga mengumumkan: *offshore* RMB bank kliring dibuka untuk memfasilitasi kliring RMB di Brasil.

April 2023, Alexander Babakov, Deputy Ketua Parlemen Rusia, Duma, menyatakan Rusia mendorong penggunaan mata uang baru berbasiskan sekeranjang mata uang yang terdiri dari real Brasil, rubel Rusia, rupee India, RMB China, dan rand Afrika Selatan (Afsel). Mata uang ini akan digunakan negara-negara BRICS: Brasil, Rusia, India, China, dan Afsel dalam transaksi mereka.

Retnetan peristiwa ini telah menimbulkan pertanyaan dan spekulasi, apakah akan terjadi dedolarisasi? Spekulasi semakin diperkuat lagi ketika melihat data bahwa peran dollar AS dalam cadangan devisa banyak bank sentral di dunia menurun. Benarkah itu? Tampaknya kita harus hati-hati untuk mengambil kesimpulan dari fenomena ini.

Pertanyaan penting yang harus dijawab adalah apakah dedolarisasi akan terjadi? Apakah RMB akan menggantikan peran dollar AS sebagai mata uang cadangan devisa (*reserve currency*)? Untuk menjawab pertanyaan ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan.

Pertama, data memang menunjukkan porsi dollar AS dalam cadangan devisa di banyak bank sentral di dunia mengalami penurunan pada 2022. Apakah ini pertanda dedolarisasi terjadi?

Barry Eichengreen, Guru Besar Ekonomi University of California Berkeley, menunjukkan ada dua alasan penurunan ini, yakni (1) apresiasi mata uang dollar AS telah memaksa banyak bank sentral di dunia melakukan intervensi guna mempertahankan nilai tukarnya. Intervensi untuk mencegah depresiasi mata uangnya mengakibatkan bank sentral melepas dollarnya. Akibatnya, tentu saja cadangan devisa dollar turun. Kemudian, (2), kenaikan tingkat bunga di AS mengakibatkan harga obligasi dollar AS menurun. Karena cadangan devisa banyak ditempatkan dalam aset yang sensitif terhadap kenaikan bunga, seperti obligasi, maka cadangan devisa dalam dollar AS juga menurun. Jadi, penurunan porsi itu bukan karena dedolarisasi.

Kedua, peran RMB dalam transaksi dan aset global masih relatif kecil. Tengok data yang disampaikan Eichengreen (2023): porsi dollar AS dan euro dalam transaksi *society of worldwide interbank financial telecommunication* (SWIFT) masing-masing masih 40 persen. Hal yang sama terjadi dalam tran-

saksi ekspor global, di mana porsi dollar AS dan euro masing-masing 40 persen. RMB? Masih sangat kecil perannya, baik dalam SWIFT maupun ekspor global.

Data juga menunjukkan peran RMB sebagai komponen cadangan devisa yang dipegang berbagai bank sentral dunia masih sangat kecil. Sebanyak 60 persen cadangan devisa dunia masih dalam mata uang dollar AS dan RMB kurang dari 3 persen. Dari sisi investasi portofolio: aset dan *liabilities* eksternal China hanya 4 persen dari keseluruhan aset global.

Berbagai MoU yang dilakukan tampaknya belum akan membuat porsi RMB mampu menyaingi dollar AS dalam waktu singkat. Peran RMB yang masih relatif kecil ini akan menyulitkan banyak negara jika ingin menggunakan RMB dalam transaksinya. Jika kita ingin bertransaksi dengan RMB, sementara RMB belum digunakan secara luas, maka akan ada kesulitan melakukan transaksi.

Persis seperti cerita saya di atas soal alat tukar "yang digunakan oleh banyak pihak". Kunci dari sebuah mata uang untuk menjadi mata uang internasional adalah "telah digunakan secara luas". Semakin kecil jumlah "yang menggunakan" semakin tinggi *transaction cost* dan *coordination cost*, dan sebaliknya.

Ketiga, penggunaan RMB masih relatif terbatas karena China masih memperlakukan kontrol devisanya. Mudah-mudahan bagaimana orang dapat melakukan transaksi atau berinvestasi di RMB jika RMB tak mudah diperjualbelikan di pasar internasional. China memang mulai melakukan relaksasi, tetapi kontrol devisa masih signifikan. Ini menjelaskan mengapa porsi RMB dalam aset global hanya 4 persen. Eichengreen menyatakan RMB bisa saja diperoleh melalui pinjaman China untuk proyek-proyek infrastruktur Belt and Road Initiative (BRI). Dengan cara ini, menurut Eichengreen, peran RMB akan meningkat secara gradual.

Sejalan dengan itu, ekonom Carmen Reinhart dari Harvard Kennedy School di sebuah seminar di Harvard University bulan lalu menunjukkan, peran China dalam transaksi *swap* global terus meningkat. China juga mulai berusaha menjadi *international lender of last resort* (memberi pinjaman terakhir) (lihat risalah awal dari Horn, Parks, Reinhart, Trebesch; akan terbit). Ada kekhawatiran Reinhart, sebagai *lender of last resort*, China kurang transparan. Kekhawatiran lain: tingkat bunganya juga relatif lebih tinggi, dan skemanya nyaris eksklusif untuk negara yang ikut proyek BRI.

Reinhart mengatakan, dengan kondisi

ini, arsitektur moneter internasional akan menjadi multipolar, kurang terinstitusikan dan kurang transparan.

Sistem multipolar?

Keempat, *Triffin Dilemma*. Ekonom Robert Triffin pernah mengajukan teori bahwa sebuah negara yang menginginkan mata uangnya menjadi mata uang dunia (*reserve currency*) harus mampu memasok mata uangnya agar dapat dipergunakan di negara lain. Bagaimana caranya? Triffin mengatakan, negara itu harus bersedia menjalankan defisit transaksi berjalan (*current account deficit*/CAD). Mengapa? CAD terjadi jika ekspor barang dan jasa sebuah negara lebih kecil dari impornya. Jika defisit terjadi, jumlah uang yang keluar lebih besar dari uang yang masuk. Dengan ini, negara tersebut akan memasok dunia dengan mata uangnya.

Singkatnya, Triffin mengatakan bahwa sebuah negara yang menginginkan mata uangnya sebagai mata uang dunia harus bersedia untuk menerima CAD. Apakah China bersedia mengimpor lebih banyak dan mengubah surplus transaksi berjalannya menjadi defisit? Argumen Triffin memang jadi bahan perdebatan. Triffin benar dalam kasus dollar AS. AS memasok dollar untuk dunia karena transaksi berjalannya defisit.

Namun, argumen ini tak sepenuhnya benar. Eichengreen menunjukkan bahwa dalam kasus zona euro dan Jepang, keduanya memiliki surplus transaksi berjalan, tetapi itu masih bisa menjadi mata uang internasional, walau perannya tak sebesar dollar AS. Lalu, apakah dedolarisasi terjadi? Apakah RMB akan menggantikan dollar AS? Saya setuju ke depan, secara perlahan, peran RMB akan semakin meningkat. Namun dibutuhkan waktu yang panjang untuk membuat RMB menjadi *reserve currency*.

Saat ini, mungkin terlalu pagi bagi kita untuk menyimpulkan bahwa RMB akan menggantikan dollar AS. Saya setuju dengan Reinhart, bahwa dalam jangka panjang arsitektur keuangan internasional mungkin akan menjadi multipolar, di mana ada beberapa mata uang internasional.

Skenario lain? Eichengreen menulis sebuah "skenario muram" dalam risalahnya: memuncaknya ketegangan China dengan AS, misalnya jika China menyerang Taiwan. Dalam kondisi ini, bukan tidak mungkin AS akan menerapkan sanksi. China akan membalas. Implikasinya, negara yang memiliki hubungan perdagangan dan keuangan dengan China dan AS akan dipaksa untuk mengikuti sistem keuangan masing-masing.

Saya sulit membayangkan dunia macam apa yang kita hadapi. Sistem keuangan yang terpecah akan membuat *transaction cost* dan *coordination cost* sangat tinggi. Ekonomi dunia akan terpecah. Biaya transaksi menjadi sangat tinggi. Melakukan transaksi mungkin akan sulit. Sesulit mencari pacar yang cocok.

Norma Ketenagakerjaan demi Investasi Berkelanjutan

Untuk memastikan kerja sama investasi Indonesia-China berjalan dengan berkelanjutan, menguntungkan kedua pihak, serta berbuah kesejahteraan, norma ketenagakerjaan harus dipenuhi.

Nur Hidayati
dari Guangzhou, China

Setahun terakhir, perbandingan soal penanaman modal asing di Indonesia, khususnya dari China, marak di masyarakat. Tak mengherankan karena nilai realisasi investasi dari China di Indonesia sepanjang 2022 melonjak sekitar 63 persen secara tahunan, mencapai 5,18 miliar dollar AS.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, nilai realisasi investasi China di Indonesia itu merupakan yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir. China menjadi negara asal penanaman modal asing yang terbesar kedua di Indonesia setelah Singapura.

Sejumlah kalangan menilai, hal ini tak lepas dari upaya Pemerintah Indonesia menggelar karpet merah bagi penanaman modal asing melalui implementasi Undang-Undang Cipta Kerja.

Sebagai konsekuensi logis dari pesatnya kerja sama investasi Indonesia-China, hubungan ketenagakerjaan di antara pelaku ekonomi dari kedua negara juga mengalami akselerasi. Untuk memastikan kerja sama investasi berjalan dengan berkelanjutan, menguntungkan kedua pihak, serta berbuah kesejahteraan, norma ketenagakerjaan harus dipenuhi.

Di satu sisi, realisasi investasi didorong sesegera mungkin dan didukung berbagai kemudahan. Di sisi lain, pemenuhan norma ketenagakerjaan membutuhkan kehati-hatian, pemahaman, dan implementasi yang adakalanya setahap demi setahap.

Terkait hal ini, Pemerintah China bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menggelar program *benchmarking* di lima kota di China pada 20-30 Mei 2023.

Dalam program tersebut, perwakilan birokrasi Kemenaker, dinas ketenagakerjaan di daerah, dan serikat buruh di pertemukan dengan pucuk pimpinan sejumlah perusahaan China yang telah berinvestasi di Indonesia. Di antara jajaran perusahaan investor itu, antara lain, China State Construction Engineering Corporation (CSEEC), Jiangsu De-Long Nickel Industry, XMXYG Corporation, dan Qinfu Group.



Pegawai China State Construction Engineering Corporation (CSEEC) di Beijing, China, menjelaskan teknologi sistem informasi yang digunakan dalam proses desain, konstruksi, dan manajemen pengelolaan proyek pada Minggu (21/5/2023).

Di sini kita melihat pucuk pimpinan perusahaan yang berinvestasi di Indonesia punya komitmen bagus. Di China, mereka juga bekerja dengan teknologi maju. Perlu kita pastikan bagaimana komitmen yang sama juga ada dalam operasional perusahaannya di Indonesia," ujar Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Kemenaker Yuli Adiratna di Guangzhou, China, Senin (29/5/2023).

Adapun Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kemenaker Haiyani Rumondang berharap, *benchmarking* ketenagakerjaan ini mengukuhkan komitmen untuk membangun relasi ketenagakerjaan yang lebih berkualitas dalam kerja sama investasi Indonesia-China.

Haiyani mencatat, agar norma ketenagakerjaan terpenuhi pada investasi asing, komunikasi harus berjalan baik. Komunikasi ini mencakup lingkup internal perusahaan serta antara perusahaan dan para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan komunitas terkait.

Komunikasi yang terkendala problem penerjemahan bahasa, misalnya, bisa berujung pada tidak dipahaminya ketentuan norma ketenagakerjaan. Manajemen perusahaan juga tak jarang menyerahkan sepenuhnya urusan pemenuhan norma ketenagakerjaan pada staf lokal tanpa pengawasan efektif.

"Harus ada *monitoring* berjenjang untuk memastikan implementasi benar berjalan sesuai standar," ujarnya.

Menindaklanjuti program *benchmarking* ini, Haiyani mengatakan, Kemenaker akan mengundang manajemen se-

jumlah perusahaan investor dan melakukan pendampingan. Hal ini dipandang perlu untuk memastikan manajemen paham dan dapat menerapkan aturan norma ketenagakerjaan.

Penggunaan teknologi

Dalam program *benchmarking* ini, delegasi, antara lain, mengunjungi proyek konstruksi yang digarap CSEEC di Beijing, China. Di situ diperlihatkan penggunaan teknologi sistem informasi yang memungkinkan proses desain, pengelolaan proyek, serta konstruksi dilakukan lebih efisien dan aman. Building Information Module System yang digunakan CSEEC juga dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja dan pengawasan proses kerja.

Badan usaha milik Pemerintah China yang terbesar di sektor konstruksi ini mempunyai proyek di Indonesia. Proyek yang sedang berjalan, an-

antara lain, pembangunan Indonesia 1 Twin Tower dan Signature Tower di Jakarta.

Pada program *benchmarking* ini, Chief Executive Officer China Qinfu Group Bai Tao turut mempresentasikan pembangunan pertambangan batubara pertama di Indonesia yang dilakukan di bawah tanah. Proyek di Kalimantan Selatan ini memulai konstruksi pada 2021 dan diproyeksikan mulai beroperasi akhir tahun ini.

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Irahm Ali Saifuddin yang juga mengikuti program *benchmarking* ini berharap investasi China di Indonesia juga diiringi transfer pengetahuan. Dengan begitu, pekerja bisa jadi bagian dari modernisasi industri. Agar aih pengetahuan terjadi, Pemerintah Indonesia perlu turut memperkuat kapasitas sumber daya manusia.

TUESDAY, 30 MAY 2023

EU deforestation-free label may run counter to SDGs

The European Council and the European Commission both agreed on May 16 to adopt the EU Deforestation-free Supply Chain Regulation (EUDR), which is designed in the context of making Europe's economy greener, all while some of its members are reverting to coal in response to the recent energy crisis in the wake of the Ukraine war.

Palm oil is one of seven commodities covered by the regulation. From the perspective of palm oil-producing countries, the regulation is baseless and misinformed for several reasons.

First, the EUDR will affect smallholders. Indonesia and Malaysia's palm oil industries, which together supply 85 percent of the global palm oil output, have created more than 20 million jobs with at least 60 percent being smallholders. They have been able to uplift farmers' families, thus shielding them from poverty.

Although the regulation stipulates that smallholders will be exempted from the rules until 2025, the main key is that when it is en-

forced, whenever that may be, it will undermine the role of palm oil as a major provider of jobs. None of the largest producing countries will let their oil palm farmers remain in poverty.

Second, by targeting palm oil the regulation demonstrates its misunderstanding of deforestation. Palm oil plantations are grown in replanted areas, unlike other commodities such as soy. In addition, palm oil contributes only 0.51 percent to global deforestation, while the livestock industry uses most land and is the main driver for global deforestation with a 71.2 percent share.

The World Resource Institute suggested that Indonesia has in fact reduced its primary forest loss rate since 2016 from almost 1 million hectares to below 0.2 million ha in 2021. Meanwhile Malaysia reduced its deforestation from nearly 0.2 million ha to 0.06 million ha during the same period.

Third, the EU is once again undermining the producers' national efforts to halt deforestation and improve sustainability in the



Insight

Rizal Affandi Lukman

Jakarta

Secretary-general of the Council of Palm Oil Producing Countries, an intergovernmental organization that promotes the development of sustainable palm oil industries

palm oil industry. Both, Indonesia and Malaysia have their national sustainability standards, namely the ISPO and MSPO, respectively. These standards adopt the principles underlined by the Sustainable Development Goals (SDGs) and the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

If the EU intends to promote more sustainable palm oil, the EU can help the producing countries to enlarge the adoption of sustainability certificates by the smallholders. For example, with fewer than 10 percent of Indonesian growers certified, they will not be able to enter the EU market.

In addition, to fulfill our global

responsibility, the secretariat of the Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) has also developed the Global Framework Principles for Sustainable Palm Oil (GFP-SPO), which will ensure that palm oil products meet the global sustainability standards applicable to all vegetable oils.

So, what can the EU do? At this stage, while the regulation is yet to be implemented, it is best for the EU and the palm oil-producing countries to engage closely with each other. As a promoter of free world trade, I am convinced that it is not within the best interests of the EU to undermine the voice of its trading partners, especially

if a policy could lead to discriminatory treatment against certain products.

If Brussels wishes to make the regulation inclusive, then Jakarta and Kuala Lumpur must be engaged. There are still plenty of opportunities to optimize. One of which will be the planned joint mission by the ministers of Indonesia and Malaysia to Brussels this week.

On May 30-31, the delegations will take this opportunity to convey the concerns of the two major palm oil-producing countries over this EU regulation. Some of the main issues regarding the EUDR that will be brought up in this mission are the burden it will put on smallholders, who are among the key players of the industry.

The EUDR implementation, its rules on geolocation, the concern over data protection and its unilateral benchmarking system will erect barriers to exports from the palm oil-producing countries. Considering their achievements in reducing deforestation, both Indonesia and Malaysia should

be classified as low-risk countries under the EUDR.

Since palm oil, as an industry, works to achieve the SDGs, Indonesia and Malaysia believe that the value of the UN agenda "Leave no one behind" can and should be applied to this regulation, by urging the EU to establish more practical approaches and measures.

To achieve this, the two governments are willing to work together with the EU to create an inclusive and holistic framework in the promotion of sustainable agriculture. This visit is hoped to unveil the greater and more prominent impact of the regulation on the palm oil sector, such as the increased cost of production, unfair playing field and the non-tariff barriers that are against WTO rules.

In the end, if the EU believes in the value of partnership, what is best for all is dialog and constructive engagement. No particular standards should be made and imposed unilaterally without addressing the concern of the palm oil-producing countries.